

PENDAMPINGAN PENERAPAN KEBIJAKAN PENETAPAN PROTOKOL COVID-19 UNTUK Mendukung Pariwisata di KOTA SEMARANG

Pranoto¹⁾, Tutik²⁾, Mukhammad Kholil Aswan³⁾

^{1,2,3)}Pariwisata, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia, Semarang
email: penulis_pranhp@yahoo.com

Submit :05/09/2021| Accept : 05/11/2021| Publish: 30/12/2021|

Abstract

The policy issued by the Government an effort to overcome the increasingly severe spread of Covid 19 has caused various tourism industries to have a very significant impact. It is a concern to be discussed. With the policies implemented, it is scourge for the live and death of the tourism industry, starting from restrictions and closures to the termination of employees in the tourism industry. The purpose of this community service is to conduct an assessment and use the results as an academic formulation that can be proposed and implemented by the Government and industry players in reviving Semarang City tourism so that it will provide support for economic turnover and regional income. This community service uses a descriptive method by reviewing the policies applied to the tourism industry. The result obtained in this service are the motivation to stay afloat for tourism actors realized by product packaging and promotions adapted to the current situation in the domestic and international scope. However, the obstacle is the existence of policies that often change, so that tourism industry players must continuously adjust the regulations set by the Government. The conclusion drawn is the decree of rules carried out repeatedly with close and overlapping time intervals eventually lead to inhibition/ termination of the tourism insdustry business in Semarang.

Keywords: Tourism Industry, Policy, Covid-19

Abstrak

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya menanggulangi penyebaran Covid-19 yang semakin parah menyebabkan berbagai industri pariwisata terkena dampak yang sangat berarti. Mulai pembatasan dan penutupan hingga berujung pada PHK karyawan di industri pariwisata menjadi perhatian yang penting untuk dibahas. Dengan adanya kebijakan yang diterapkan menjadikan momok tersendiri bagi mati hidupnya industri pariwisata. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk melakukan pengkajian dan menggunakan hasilnya sebagai rumusan akademis yang bisa diusulkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun pelaku industry dalam menghidupkan kembali pariwisata Kota Semarang sehingga akan memberikan dukungan terhadap perputaran ekonomi dan pemasukan pendapatan daerah. Pengabdian ini menggunakan metode deskriptif dengan mengkaji kebijakan yang diberlakukan bagi industri pariwisata. Hasil yang didapatkan dalam pengabdian ini adalah adanya motivasi untuk tetap bertahan bagi pelaku pariwisata yang diwujudkan dengan pengemasan produk dan promosi yang disesuaikan dengan situasi saat ini dalam lingkup domestik maupun internasional. Namun yang menjadi hambatannya adalah adanya kebijakan yang seringkali mengalami perubahan, sehingga pelaku industri pariwisata harus terus menerus menyesuaikan kebijakan yang ditetepkan oleh pemerintah. Kesimpulannya adalah penetapan kebijakan yang dilakukan secara berulang kali dengan jarak waktu yang berdekatan dan saling tumpang tindih akhirnya menyebabkan terjadinya penghambatan/ penghentian bisnis industri pariwisata di Kota Semarang.

Kata Kunci: Industri Pariwisata, Kebijakan, Covid-19

PENDAHULUAN

Kesetabilan perekonomian merupakan salah satu hal terpenting bagi suatu negara untuk mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Apabila perekonomian mengalami penurunan maka hal ini tentu akan berimbas kepada kehidupan masyarakat secara menyeluruh yang berlangsung pada menurunnya daya beli masyarakat hingga kemiskinan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka suatu negara akan berupaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian melalui produktivitas.

Satu setengah tahun lebih dunia menghadapi dilemanya perekonomian yang diakibatkan oleh penyebaran wabah penyakit Covid-19. Banyaknya sektor-sektor yang runtuh akibat meluasnya penyebaran virus tersebut mengakibatkan produktivitas di berbagai wilayah Kota Semarang terhenti, dan terpaksa melakukan pembatasan demi dapat meminimalisir percepatan penyebaran virus. Pada bulan Agustus 2020, Kota Semarang menjadi salah satu kota tertinggi dalam kasus penyebaran Covid-19.

Upaya dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 telah dilakukan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, yaitu penutupan akses keluar masuk antar kota hingga pembatasan wilayah baik dalam skala domestik maupun internasional. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut maka munculah dampak baru dari segi sosial ekonomi di Kota Semarang. Diantaranya adalah para pelaku usaha terutama pada sektor riil mulai menutup sementara hingga permanen perusahaannya, dan hal ini pun berujung pada PHK Karyawan. Besarnya dampak pembatasan ini secara tidak langsung telah mengakibatkan perekonomian turun karena siklus perdagangan tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Semarang merupakan Kota dimana pihak swasta masih memiliki kontribusi

yang kuat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama pada industri pariwisata. Sehingga mau tidak mau Semarang harus tetap menggerakkan roda perekonomian agar dapat produktif untuk menyediakan alat pemuas kebutuhan bagi masyarakat. Namun, ditengah pandemi seperti ini pun Kota Semarang harus mengeluarkan berbagai upaya agar perekonomian tetap jalan tapi penyebaran Covid-19 juga dapat dihentikan.

METODE KEGIATAN

Metode dalam pengabdian ini adalah berupa pelatihan, pendampingan, dan diskusi secara offline maupun online dengan melibatkan pelaku usaha industri pariwisata. Kegiatan pengabdian ini berlangsung selama 1 tahun dengan beberapa kegiatan. Pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh 3 dosen yaitu 1 dosen pariwisata dan 2 dosen manajemen.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menggunakan alat bantu seperti laptop dan LCD selama kegiatan dapat berlangsung secara tatap muka, namun jika mengharuskan melalui online menggunakan virtual converence zoom meeting, karena mengingat kondisi lapangan yang tidak memungkinkan untuk berkumpul dalam jumlah melebihi ketentuan protokol kesehatan pada masa pandemi. Rangkaian pengabdian kepada masyarakat pada tahap pertama adalah persiapan tim dan mengumpulkan berbagai kebijakan yang pernah dikeluarkan terutama bagi industri pariwisata. Tahap kedua adalah tim melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pelaku industri pariwisata untuk merencanakan program pengabdian masyarakat. Tahap ke tiga melaksanakan rencana pengabdian masyarakat dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi selama pandemi. Tahap ke empat yaitu penyusunan hasil dan laporan pengabdian masyarakat.



Gambar 1. Koordinasi dengan Pelaku Pariwisata Kota Semarang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor yang selama ini masih menjadi dilema adalah industri pariwisata, dimana didalam pariwisata melibatkan banyak orang untuk melakukan kegiatan berwisata dengan adanya dukungan berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, stakeholder, dan pemerintah, (Hermawan 2017). Dengan diberlakukan berbagai kebijakan tentu industri pariwisata juga terkena imbasnya. Hal ini karena sektor industri pariwisata merupakan sektor yang melibatkan banyak orang sehingga akan mengancam penyebaran pada cluster-cluster pariwisata itu sendiri.



Gambar 2. Seminar Online bersama Pelaku Pariwisata Kota Semarang

Menyikapi permasalahan yang ada, maka dilakukan sosialisasi dan sharing bersama dengan tokoh pariwisata dan pelaku industri pariwisata secara online. Hasil yang diperoleh dari diskusi tersebut adalah bahwa dalam menindaklanjuti

pembatasan berwisata secara keseluruhan, industri pariwisata sudah berupaya untuk terus mengikuti kebijakan dan regulasi yang ada dari Pemerintah. Dari berbagai kebijakan yang diikuti dan diterapkan, justru seakan-akan industri pariwisata merasa di ombang-ambing dengan kebijakan yang ada. Pasalnya, dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu berimbas pada melonjaknya jumlah pengunjung setiap selesai kebijakan itu diberlakukan. Sehingga dari sini pihak industri pariwisata merasa selalu disalahkan dengan keadaan tersebut. Selain itu, kebijakan yang sewaktu-waktu berubah dengan jarak yang tidak lama menjadi dilema tersendiri bagi pelaku pariwisata. Hal ini dikarenakan setiap diberlakukannya kebijakan, sering kali mengalami perubahan yang cepat, sehingga bagi industri pariwisata yang tidak siap dan kuat dalam menghadapi perubahan kebijakan akan lebih memilih untuk menutup sementara bahkan penutupan permanen usaha pariwisatanya tersebut.

Adapun kebijakan yang sempat dilakukan adalah menutup obyek wisata selama kurun waktu yang ditentukan dan melakukan pembatasan pengunjung. Aturan yang sempat diberlakukan dalam mencegah penyebaran virus adalah Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.01/MENKES/335/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di tempat kerja Sektor Jasa dan Perdagangan Area Publik dalam mendukung keberlangsungan usaha.

Penyampaian hasil rapat koordinasi protokol bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia No156/DEPUTI/V/MERVES/V/2020. Hal ini dimana dalam surat himbuan tersebut menyatakan bahwa untuk menindaklanjuti penyebaran Covid-19 dan mencegah

penyebaran secara luas maka usaha sektor jasa dan perdagangan area publik harus menerapkan protokol kesehatan.



Gambar 3. Pendampingan Pelaku Pariwisata secara Offline.

Gambar tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan secara offline untuk menyikapi dan memahami kebijakan pemerintah dalam pariwisata. Dari hasil pendampingan didapatkan kesimpulan bahwa aturan dalam mencegah penularan Covid-19 tentu sudah diikuti dan dilaksanakan oleh dunia pariwisata agar dapat berjalan dengan baik dan taat prosedur. Namun ditengah semakin tingginya angka penyebaran Covid-19 mengakibatkan Pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan wilayah dalam skala kecil dan besar. Sebagai contoh pada saat bertepatan hari Raya Idul Fitri, Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Tugas (Satgas) mengenai penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021. Dimana dalam Surat Edaran ini berisikan mengenai larangan masyarakat untuk mudik dan larangan perjalanan wisata jarak jauh selama kurun waktu yang ditentukan.

Diberlakukannya kebijakan tersebut tentu memberikan dampak yang positif bagi keadaan Kota Semarang. Namun yang menjadikan kendala adalah lonjakan pengunjung ke tempat wisata setelah selesai diberlakukannya surat edaran tersebut. Adanya fenomena ini justru Pemerintah menyoroti destinasi wisata dan

menyalahkan pelaku industri pariwisata, selama ini yang terjadi adalah pariwisata seolah-olah menjadi suatu momok yang menyebabkan terjadinya cluster-cluster baru.

Sesuai dengan arahan Pemerintah mengenai industri pariwisata harus memiliki sertifikat yang cukup agar dapat beroperasi maka Kementerian Pariwisata pada tahun 2020 sampai dengan 2021 memfasilitasi industri pariwisata untuk mendapatkan sertifikasi. Selain itu, industri pariwisata juga dapat melakukan secara mandiri melalui Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU). Tidak hanya melalui sertifikasi saja, bahwa industry pariwisata juga mengikuti pembinaan dan seminar-seminar baik secara offline maupun online untuk mendapatkan bekal mengenai penerapan protokol kesehatan bagi palaku usaha pada industri pariwisata. Dari berbagai upaya yang dilakukan industri pariwisata dapat disimpulkan bahwa industri pariwisata tidak ada masalah karena sudah mengikuti kebijakan Pemerintah termasuk harus mengikuti sertifikasi CHSE baik itu untuk hotel, destinasi wisata yang telah memberlakukan mulai dari pintu masuk hingga dalam destinasi itu sendiri, rumah makan yang tidak memperbolehkan pengunjung mengambil makanan sendiri, hingga transportasi yang harus mengikuti aturan dan kebijakan Pemerintah untuk menerima penumpang maksimal 50%. Dari kebijakan tersebut tentu berdampak pada pendapatan industri pariwisata yang menurun sehingga mau tidak mau akan berimbas pada kenaikan harga jual produk wisata.

Diberlakukannya perpanjangan PPKM berbasis mikro yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2021 tanggal 15–28 Juni 2021 sudah cukup membuat industri pariwisata kebingungan setelah diberlakukannya PPKM bulan Mei lalu. Selesai batas waktu, muncul lagi surat edaran yang menegaskan bahwa akan

dilanjutkan lagi penerapan PPKM Mikro darurat mulai tanggal 03–20 Juli 2020. Penerapan PPKM yang diterapkan di Kota Semarang ternyata tidak sejalan dengan kebijakan yang telah diterapkan negara lain, sebagai contoh di Singapura secara resmi menyatakan bahwa Covid-19 sama halnya dengan flu biasa sehingga PPKM tidak perlu diadakan bagi negara kecil tersebut (Liputan6). Belum selesai kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali diterapkan, sudah muncul isu baru bahwa akan ada perpanjangan PPKM Darurat selama 6 pekan, dimana ketika perpanjangan ini dilakukan maka akan mengancam berbagai pelaku usaha di industri pariwisata.

Kondisi Industri pariwisata yang makin terpuruk dan tidak diperbolehkannya beroperasi justru malah berimbas kepada tenaga kerja yang harus dirumahkan bahkan kehilangan pekerjaannya. Namun meskipun demikian, Ketua DPD ASITA se-Indonesia melalui Surat Edaran Nomor: 026/DPP-ASITA/III/2020 perihal hasil rapat koordinasi ASITA antar Kementerian sepakat bahwa Pemerintah akan memprioritaskan anggaran tahun 2020 untuk program-program kesehatan, Social Safety net dan sektor keuangan. Selain itu, dalam surat edaran juga menjelaskan bagi pekerja di sektor pariwisata yang terkena PHK akan diberikan kartu pra-kerja sebesar Rp. 650.000 per bulan selama 4 bulan penuh dan subsidi untuk mengikuti pelatihan sebesar Rp. 1.000.000. Dan memberikan insentif yang sepadan bagi perusahaan di sektor pariwisata bagi yang tidak melakukan PHK karyawan. Upaya bantuan yang diberikan kepada tenaga kerja di sektor pariwisata justru tidak sesuai dengan data yang ada, dimana selama ini belum ada ketersediaan data yang akurat mengenai berapa jumlah tenaga kerja yang masuk dibidang pariwisata, sehingga upaya yang telah dilakukan Pemerintah terkesan belum tepat sasaran.

SIMPULAN

Dengan progam Hasil yang didapatkan dalam pengabdian ini adalah adanya motivasi untuk tetap bertahan bagi pelaku pariwisata yang diwujudkan dengan pengemasan produk dan promosi yang disesuaikan dengan situasi saat ini dalam lingkup domestik maupun internasional. Namun yang menjadi hambatannya adalah adanya kebijakan yang seringkali mengalami perubahan, sehingga pelaku industri pariwisata harus terus menerus menyesuaikan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kesimpulannya adalah penetapan kebijakan yang dilakukan secara berulang kali dengan jarak waktu yang berdekatan dan saling tumpang tindih akhirnya menyebabkan terjadinya penghambatan/ penghentian bisnis industri pariwisata di Kota Semarang. Saran yang dapat disampaikan adalah perlunya penguatan database jumlah tenaga kerja atau karyawan yang bekerja di industri pariwisata, agar dalam pemberinan bantuan yang mengarah pada masyarakat dapat segera tersalurkan. Pada saat Pemerintah menentukan kebijakan harapannya Pemerintah melihat kebutuhan dan kepentingan industri pariwisata karena selama ini Pemerintah hanya memperhatikan industri lain sehingga industri pariwisata menjadi korban. Kebijakan harus disosialisasikan atau diterapkan dengan perhitungan waktu yang memberikan kesempatan kepada industri pariwisata untuk menyiapkan diri dengan baik dan tidak terlalu sering berubah-ubah sehingga industri pariwisata dapat tetap beroperasi dengan mengikuti protokol kesehatan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terimakasih kepada Kemenparekraf, Indonesia Inbound Tour Operator Association (IINTOA), Association of Indonesia Travel Agencies (ASITA), Komunitas Pejuang Devisa

Pariwisata Indonesia, Forum Komunikasi Desa Wisata (FK Deswita), Persatuan Hotel Dan Restaurant Indonesia (PHRI), Pelaku Industri Pariwisata Kota Semarang, dan seluruh masyarakat pelaku industri pariwisata yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

“Antisipasi Abrasi, Ikapari Berbhakti 2020 Tanaman 2000 Mangrove Di Pulau Tiban.” n.d. Accessed August 15, 2021. <https://www.kabar14.com/2020/09/antisipasi-abrasi-ikapari-berbhakti.html>.

“Dosen Stiepari Semarang: Harus Ada Inovasi Agar Kampung Tematik Semarang Tetap Hidup - Aku Pintar.” n.d. Accessed August 15 2021. <https://akupintar.id/universitas/-/kampus/detail-berita/sekolah-tinggi-ilmu-ekonomi-pariwisata-indonesia-semarang/berita/dosen-stiepari-semarang--harus-ada-inovasi-agar-kampung-tematik-semarang-tetap-hidup/beritauniv/105439>.

“Durasi Karantina Pelaku Perjalanan Luar Negeri Bakal Diperpanjang Jadi 14x24 Jam.” n.d. Accessed September 5, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/04/17054441/durasi-karantina-pelaku-perjalanan-luar-negeri-bakal-diperpanjang-jadi-14x24>.

Febriansah, Rizky Eka, Aisha Hanif, and Cindy Taurusta. 2021. “Mosquepreneur: Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Ekonomi Umat Pada Masa Pandemi COVID-19.” The 2nd Seminar Nasional ADPI Mengabdikan Untuk Negeri Pengabdian Masyarakat Di Era New Normal 2 (2): 37.

“Foto Stiepari – METROSEMARANG.Com | Kabar Berita Semarang 24 Jam.” n.d. Accessed August 15, 2021. <https://metrosemarang.com/stiepari-semarang-juara-tiga-lomba-tari-di-ui-27785/foto-stiepari>.

Hall, Derek. 2005. Rural Tourism as Sustainable Business: Key Themes and Issues. *Rural Tourism as Sustainable Business*.

Hermawan, Hary. 2017. “Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal” III (2): 105–17. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xhkwv>.

“Indonesia, Bali Will Reopen to International Tourists in July - NZ Herald.” n.d. Accessed September 5, 2021. <https://www.nzherald.co.nz/travel/in-donesia-bali-will-reopen-to-international-tourists-in-july/K7TZT6VPGQMUXMQ4KADC4FN52A/?fbclid=IwAR256cehDG5wv33rGWsYxal2muEuoyUk6mehQWtXiSwOFjARGPv2pGRUQ> di akses tanggal juli 2021

“Kemungkinan Pendirian Maskapai Domestik Baru Pengganti Garuda Indonesia - ITN.” n.d. Accessed September 5, 2021. <https://wp.indonesiatouristnews.com/?p=1562> di akses tanggal juli 2021

“Kunjungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang Ke KBRI Bangkok – Berita ATDIKBUD.” n.d. Accessed August 15, 2021. <https://atdikbudbangkok.org/>